

## **Efektivitas Pelayanan Program Keluarga Berencana Melalui Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa**

Oleh:

<sup>1</sup> Deddy Febryan; <sup>2</sup> Tukiman

<sup>1,2</sup>. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Email. Deddy.febryan.2001@gmail.com

### **Abstrak**

Terbatasnya akses pelayanan keluarga berencana yang masih belum dapat menjangkau ke seluruh masyarakat dikarenakan wilayah yang jangkauannya cukup jauh dan kurangnya sarana sosialisasi untuk menjangkau masyarakat yang berada di desa-desa pelosok. serta masih terdapat wilayah kecamatannya yang belum terjangkau fasilitas kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan program keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa sudah efektif dilihat dari : 1) Pencapaian Tujuan, pelayanan keliling sudah tercapai tujuannya dengan melihat sudah adanya jadwal pelaksanaan dan sasaran program yang jelas namun masih terkendala oleh kurangnya pendanaan. 2) Adaptasi, pada pelayanan keliling ini sarana prasarana menggunakan fasilitas yang sudah ada, pengisian tenaga kerja berasal dari pegawai dinas serta pelatihan CTU telah diberikan kepada para bidan desa. 3) Integrasi, sudah dilakukan sosialisasi melalui para penyuluh di setiap kecamatan. Prosedur pelayanan sudah ada namun dapat bersifat kondisional tergantung keadaan dilapangan serta sudah dilakukan kordinasi dengan Dinas kesehatan, IBI, dan IDI terkait penugasan tenaga medis

**Kata Kunci: Efektivitas; Keluarga Berencana; Pelayanan Publik**

### **Abstract**

*Access to family planning services is limited, which cannot reach the entire community because the area is far enough away and there is a lack of socialization facilities to reach people in remote villages. Also, there are still sub-districts where health facilities have not been reached. The purpose of this study was to determine the effectiveness of family planning program services through a car service around the village with the village midwife. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the family planning program services through village mobile services with village midwives were effective in terms of: 1) Achievement of Goals, mobile services had achieved their objectives by seeing that there was already a clear implementation schedule and program objectives but were still constrained by budget savings. 2) Adaptation, in this mobile service the infrastructure uses existing facilities, staffing comes from official employees and CTU training has been given to village midwives. 3) Integration, socialization has been carried out through extension workers in each sub-district. Service procedures already exist but can be conditional depending on conditions in the field and coordination has been carried out with the Health Office, IBI and IDI regarding the assignment of medical personnel*

**Keywords: Effectiveness; Family planning; Public service**

## PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.812,8 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data BPS penduduk Kabupaten Lamongan berjumlah 1.344.165 jiwa tahun 2020, dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk menjadi 1.356.027 jiwa tersebar pada 27 kecamatan dan 476 desa yang berarti Kabupaten Lamongan mengalami pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya (Data BPS, 2021). Banyaknya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Lamongan terutama pasangan usia subur yang masih belum ikut keluarga berencana. Kurangnya pengetahuan dan akses untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga berencana menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang program tersebut, didalam masyarakat banyak bermunculan pemahaman yang kurang baik mengenai penggunaan kontrasepsi terutama kontraepsi jangka panjang pada program keluarga berencana. Banyak beredar kabar kurang mengenakan ditengah masyarakat dimana hal itu mengakibatkan timbulnya rasa takut terhadap pilihan metode kontrasepsi keluarga berencana (Maryam, 2014). Masyarakat Kabupaten Lamongan banyak yang masih beranggapan bahwa KB itu merupakan sesuatu hal yang tidak umum serta tidak penting. Dilihat dengan masih banyaknya masyarakat kurang paham betapa pentingnya untuk mengikuti KB, yang menyebabkan munculnya permasalahan di masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Lamongan banyak yang masih menganut pemahaman “banyak anak banyak rezeki”. Banyak yang memiliki referensi yang berbeda mengenai jumlah anak, masyarakat memahami bahwa setiap anak yang dilahirkan pasti mempunyai rezeki yang mengikuti. Bahwa anak merupakan titipan dari tuhan untuk orang tua memiliki nilai tertentu. Nilai disini merujuk bahwa anak itu dapat membantu keuangan orang tua ketika sudah lanjut usia, memberikan pertolongan secara psikologis kepada orang tua ketika sudah tua, membantu bisnis keluarga, memberikan pertolongan kepada saudara yang lain dan silsilah keturunan (Mufasirin, 2021). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingginya jumlah kelahiran anak di Kabupaten Lamongan.

**Tabel 1 Jumlah Kelahiran Anak Kabupaten Lamongan 2018-2020**

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah Kelahiran	15.790	16.449	16.739

Tingginya jumlah kelahiran tersebut salah satunya penyebabnya diakibatkan oleh terbatasnya akses pelayanan keluarga berencana yang berakibat banyaknya masyarakat terutama yang bertempat tinggal di desa-desa terpencil dan terpelosok masih belum ikut serta keluarga berencana serta masih banyaknya wilayah yang fasilitas kesehatan belum dapat mencakup seluruh wilayah kerjanya. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas merupakan garda terdepan yang menjadi andalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih banyak puskesmas masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah terpencil dan terpelosok. Secara geografis banyak wilayah yang masih sulit untuk dijangkau, juga karena penduduk yang

berjumlah sedikit dan tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan (Suharmiati et al., 2012). Hal tersebut berlaku juga dalam pemasangan kontrasepsi belum semua puskesmas memiliki peralatan yang memadai untuk dapat melakukan pemasangan kontrasepsi. Kabupaten Lamongan memiliki beberapa kecamatan yang wilayahnya masih belum terjangkau fasilitas kesehatan terutama Puskesmas antara lain; Sambeng, Ngimbang, Kembang bahu, Sugio, Tikung, Modo, Deket, Sekaran, Karangbinangun, Glagah, Kalitengah, Turi, Sekaran, Karanggeneng, Paciran, Brondong, Laren, terdapat kira-kira 1,51% luas pemukiman yang belum terjangkau serta 31.900 KK yang belum terjangkau fasilitas kesehatan terutama Puskesmas di kabupaten Lamongan (Arif & Zain, 2019).

Dinas PPKB kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 188/40.1/KEP/413.109/2019 membuat suatu bentuk pelayanan keluarga berencana keliling melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa dalam mengatasi permasalahan keterbatasan akses pelayanan keluarga berencana tersebut. Pada awalnya ini adalah program yang berasal dari BKKB pusat dimana hal tersebut berupa mobil unit pelayanan keluarga berencana namun Dinas PPKB kabupatenn Lamongan merasa bahwa program tersebut kurang maksimal karena hanya terdiri dari satu mobil yang mengakibatkan jangkauan dari pelayanan tersebut tidak bisa menyeluruh dengan dibatasi waktu-waktu tertentu dan rendahnya pengetahuan mengenai KB serta kurangnya minat dari masyarakat mengenai kontrasepsi jangka panjang.

Program pelayanan tersebut mencoba memberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi dengan mendekati tempat pelayanan agar para akseptor tidak harus ke fasilitas kesehatan dengan jarak yang jauh, mereka bisa endapatkan pelayanan di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Misalnya ada akseptor berasal dari wilayah sekitar desa yang terdapat pelayanan tersebut, mereka hanya harus menunggu di wilayah desa mereka masing-masing. Mereka akan dijemput menggunakan mobil antar jemput akseptor yang telah disediakan dan saat dilakukannya pemasangan kontrasepsi akan diberikan penjelasan oleh para bidan desa terlebih dahulu mengenai apa yang akan dipasang untuk mencegah kehamilan.

Pelayanan keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling tersebut sesuai dalam bidang kesehatan. Program keluarga berencana memiliki tujuan supaya masyarakat melakukan perencanaan dan menentukan kelahiran, agar para anak yang lahir bisa mendapatkan hak dasarnya secara maksimal yaitu Gizi yang terpenuhi melalui pemberian ASI yang cukup dan kasih sayang kepada anak, diharapkan dapat mencegah masalah kesehatan termasuk turunnya angka kematian bayi dan ibunya setiap tahun. Dengan bertambahnya jumlah peserta KB pengguna kontrasepsi jangka panjang dimungkinkan agar kelalaian dalam penggunaan kontrasepsi tidak ada lagi. Kelalaian dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan, dimana berakibat pada anak yang nantinya kurang asupan ASI nya, dengan tidak adanya kelalaian dapat berkurangnya resiko kesehatan kepada anak seperti stunting dan gizi buruk disebabkan jeda antar kelahiran telah direncanakan dari awal serta bagi ibu terhidar resiko penyakit

saluran reproduksi. Pada awalnya sebelum adanya inovasi pelayanan tersebut Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ingin pindah menggunakan kontrasepsi jangka pendek ke kontrasepsi jangka panjang, dengan hadirnya mobil pelayanan keliling tersebut pasangan usia subur lebih hemat waktu karena jarak pelayanan pemasangan kontrasepsi yang lebih dekat serta tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi lagi. Program pelayanan tersebut memperoleh apresiasi dari BKKBN Provinsi Jawa Timur karena merupakan program pelayanan pertama di Jawa Timur yang langsung menjemput bola ke masyarakat.

Pada awalnya program ini memiliki penjadwalan yang jelas dan ditentukan setiap tiga bulan, penjadwalan ini dilakukan pada beberapa kecamatan sehingga para akseptor dapat mempersiapkan waktu untuk melakukan pemasangan kontrasepsi, namun beberapa tahun belakangan tidak terdapat jadwal yang jelas terkait pelaksanaan pelayanan keliling tersebut. Pelaksanaannya hanya berupa ajuan dari masyarakat desa yang membutuhkan pemasangan kontrasepsi dan tidak ada target pelaksanaannya dalam setahun hal tersebut bertentangan dengan ketentuan awal dimana program ini dibuat untuk memperbaiki program yang sudah ada dengan menjadwalkan secara periodik kapan dilaksanakan program tersebut, hal ini sesuai uraian mengenai pelayanan melalui mobil pelayanan berdasarkan Laporan Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa Tahun 2020 dimana pelayanan tersebut ada untuk memperbaiki program sebelumnya yang sudah ada namun terbatas oleh waktu pelaksanaan (Dinas PPKB Kabupaten Lamongan) dan pelayanan hanya dilaksanakan saat terdapat momen kedaerahan serta momen BKKBN saja.

**Tabel 2 Jumlah Peserta KB Aktif dan Peserta Pengguna MKJP Kabupaten Lamongan 2019 - 2021**

Jumlah	2019	2020	2021
Peserta KB Aktif	242.147	238,029	155.487
MKJP	52.944	52.851	29.422

Setelah tidak dilakukan penjadwalan terjadi penurunan peserta aktif KB dan peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, hal tersebut bertentangan dengan tujuan awal dilaksanakannya untuk meningkatkan jumlah peserta KB yang menggunakan MKJP dan mencegah peserta KB yang drop out. Dalam pelaksanaannya pelayanan sosialisasi dilakukan dengan penyampaian informasi kepada para penyuluh KB yang mempunyai total 96 orang penyuluh yang membawahi 474 desa dimana hal tersebut kurang ideal karena harusnya satu penyuluh membawahi 2 desa sedangkan penyuluh di Kabupaten Lamongan membawahi 4 desa, hal tersebut berdampak kurang optimalnya akan penyampaian informasi kepada masyarakat disebabkan terlalu banyak desa yang ditangani oleh seorang penyuluh. Program ini merupakan yang pertama di Jawa Timur dan masih belum adanya penelitian yang membahas mengenai efektivitas pelayanan keluarga berencana melalui mobil keliling tersebut. Maka berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelayanan program keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di lapangan secara menyeluruh terkait topik penelitian yang diteliti. Fokus dari penelitian ini yaitu Efektivitas Pelayanan Program Keluarga Berencana melalui Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa dengan menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985) yang dikutip Yuningsih (2017). Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 3 triangulasi yaitu Triangulasi Teknik, Triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan tindakan untuk memberikan kepuasan bagi para penerima pelayanan, dekat kepada penerima pelayanan serta memberikan rasa senang bagi masyarakat atau penerima pelayanan. Pelayanan public dapat juga dijelaskan sebagai pelayanan atau pemberian kepada masyarakat dalam bentuk saran prasarana umum, bantuan ini berupa jasa maupun non jasa dari organisasi yang bergerak dibidang publik kepada para masyarakat. Menurut Ratminto, pelayanan publik sebagai semua bentuk berupa jasa pelayanan, baik itu bentuk barang publik maupun jasa publik dimana pada dasarnya menjadi tanggung jawab serta dilakukan oleh institusi pemerintah maupun daerah dimana pelaksanaannya pada lingkungan BUMN maupun BUMD, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam pelaksanaan ketentuan dari undang-undang. (Auliansyah, 2020)

Mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa adalah bentuk pelayanan keliling yang dikeluarkan oleh Dinas PPKB kabupaten Lamongan untuk mempermudah masyarakat dalam pemasangan kontrasepsi terutama kontrasepsi jangka panjang. Pelayanan ini mulai diumumkan pada akhir 2018 dan dilaksanakan pada 9 April 2019 hingga saat ini. Pelayanan ini terdapat dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 188/40.1/KEP/413.109/2019 Tentang Inovasi Pelayanan KB Melalui Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa. Tujuan dibuatnya pelayanan keliling tersebut untuk meningkatkan peserta keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang dan mencegah peserta keluarga berencana agar tidak *drop out*. Biaya operasional pelayanan keluarga berencana melalui Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa tersebut berasal dari anggaran APBD Kabupaten Lamongan setiap tahunnya dan dana BOKB yang digunakan untuk mengadakan alat transportasi berupa satu unit Hiace, satu unit mini bus yang dipergunakan dalam pelayanan pemasangan kontrasepsi.

Berikutnya akan dijelaskan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan mengenai efektivitas pelayanan program

keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa menggunakan teori efektivitas Duncan dalam Steers (1985) yang dikutip oleh (Yuningsih, 2017) meliputi tiga ukuran yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi

### **Pencapaian Tujuan**

Pada ukuran pencapaian tujuan merupakan seluruh usaha yang dilakukan dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai proses oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Oleh sebab itu, supaya pencapaian tujuan akhir semakin pasti, diperlukan tingkatan, baik dalam arti tingkatan dalam pencapaian dari bagian-bagiannya maupun tingkatan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit (Yuningsih, 2017).

#### **1. Tujuan Pelayanan**

Berdasarkan hasil penelitian, pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana melalui mobil keliling sudah mempunyai tujuan kenapa pelayanan ini dibuat, hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa tujuan dari mobil keliling ini untuk meningkatkan peserta keluarga berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan mencegah peserta KB untuk *drop out* (sudah tidak menggunakan KB lebih dari tiga bulan), dimana dapat dilihat adanya penambahan akseptor saat diadakannya pelayanan mobil keliling tersebut antara lain : kegiatan TNI manunggal bangga kencana kesehatan terpadu dan hari kontrasepsi sedunia, sebanyak 13 akseptor Implant, kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGKM) ke XIX, sebanyak 25 akseptor Implant, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 1 sebanyak 33 akseptor Implant dan TMMD II sebanyak 16 akseptor Implant. Menurut Mahmudi, menjelaskan dimana pelayanan publik merupakan setiap kegiatan pelayanan yang mana pelaksanaannya dilakukan pelaksana pelayanan publik sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan publik serta melaksanakan peraturan perundang-undangan (Han & goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee, 2019).

Dinas PPKB Kabupaten Lamongan berusaha untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat terkait pemasangan kontrasepsi dan akses yang lebih mudah serta dengan diadakannya pelayanan tersebut masyarakat dapat terbantu karena pelayanan langsung datang ketempat para akseptor yang akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi serta pelayanan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak.

#### **2. Kurun Waktu Pelayanan**

Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan sudah terdapat kurun waktu yaitu pelayanan menggunakan mobil keliling dijadwalkan setiap tiga bulan dimana tersebut terdiri dari nama kecamatan, tanggal pelaksanaan, dan jam pelaksanaan pelayanan (Laporan mobil pelayanan keliling, 2020), agar masyarakat yang akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi bisa mempersiapkan waktu. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1998 dan Kepmenpan No.81 Tahun 1995 dalam

Hardiyansyah (2011:48), dimana standar dari pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari beberapa kriteria salah satunya ketepatan waktu merupakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah diputuskan (Reyes, 2018).

Dinas PPKB Kabupaten lamongan membuat penjadwalan pelayanan setiap tiga bulan dan menentukan jam pelayanan mulai dari pukul 9 pagi sampai selesai, waktu pelayanan tersebut tergantung jumlah akseptor yang akan melakukan pemasangan kontrasepsi. Pelayanan melalui mobil keliling juga dilakukan pada saat ada momen-momen kedaerahan serta acara dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dalam pelaksanaan penjadwalan dan waktunya sudah dilakukan dengan baik, namun penjadwalan setiap tiga bulan tersebut selama beberapa tahun belakangan tidak ada hal tersebut dikarenakan kurangnya pendanaan yang mana menjadi faktor penting dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

### **3. Sasaran yang Merupakan Target Konkrit**

Pada pelaksanaannya pelayanan melalui mobil pelayanan keliling sudah memiliki sasaran yang sudah ditetapkan untuk penerima pelayanan tersebut yaitu Pasangan Usia Subur (PUS), masyarakat yang belum ber-KB dan peserta KB yang drop out. Menurut Tachjan (2006) kelompok sasaran adalah kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang akan menjadi penerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan (Agustina, 2014).

Sasaran dari pelaksanaan pelayanan ini sudah tepat sasaran dimana pada awalnya masyarakat terutama pasangan usia subur tidak mau untuk berganti metode kontrasepsi dari kontrasepsi jangka pendek ke kontrasepsi jangka panjang, namun karena adanya pelayanan ini masyarakat lebih efektif waktu karena jarak yang dekat dengan tempat tinggalnya dan dapat menerima pelayanan keluarga berencana di desanya masing-masing serta pelayanan tersebut gratis.

### **Adaptasi**

Pada ukuran adaptasi adalah pengukuran kemampuan dari organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pengukurannya menggunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja (Yuningsih, 2017). Kemampuan adaptasi adalah kemampuan dalam merubah atau menyesuaikan prosedur standar operasinya secara fleksibel jika lingkungan sekitarnya mengalami perubahan, dengan demikian adaptasi merupakan suatu proses menyesuaikan diri yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya (Roza & Laurensius, 2017).

#### **1. Proses pengadaan sarana prasarana**

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan keluarga berencana melalui mobil keliling oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan pada proses pengadaan tidak dilakukan pengadaan sarana prasarana secara khusus terkait pelaksanaan pelayanan namun memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada. Pada pelaksanaan pelayanan tugas dari bagian bidang keluarga berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya melakukan pengecekan

kesiapan sebelum dilaksanakannya pelayanan menggunakan mobil pelayanan keliling serta memastikan mobil tersebut sampai ke desa yang dituju untuk melaksanakan pelayanan. Saran prasarana atau fasilitas yaitu untuk mempermudah usaha serta memperlancar pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan, menurut Subroto dalam Arianto (2008), fasilitas atau saran prasarana merupakan segala upaya yang dapat mempermudah dan meperlancar pelaksanaan dari suatu usaha yang berupa benda-benda maupun uang (Junaidi, 2013).

Dinas PPKB memilih menggunakan sarana prasarana yang telah ada, berupa Mobil Unit Pelayanan keluarga berencana yang digunakan untuk ruang operasi kecil tempat pemasangan kontrasepsi, mobil antar jemput akseptor yang digunakan untuk antar jemput para akseptor yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelayanan, dan mobil distribusi alkon yang digunakan untuk mengantarkan alat kontrasepsi ke lokasi pelayanan. Hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan untuk membuat pelayanan baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga dalam hal pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Lamongan.

## **2. Pengisian Tenaga Kerja**

Pada pengisian tenaga kerja pelayanan keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling ini dijalankan oleh para pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yang berada dibagian bidang keluarga berencana yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 188/85.1/KEP/413.109/2019 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Desa (MONALISA BERDANSA). Tenaga kerja merupakan sekelompok masyarakat dalam usia kerja yang mana seseorang tersebut mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis untuk menghasilkan barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nuraulian, 2017).

Pada pengisian tenaga kerja Dinas PPKB menggunakan sumber daya manusia yang sudah ada yaitu pegawai bidang keluarga berencana untuk menjalankan pelayanan melalui mobil pelayanan keliling, para pegawai tersebut sudah menjalankan dengan baik, dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti mengecek mobil dan alat kontrasepsi yang akan digunakan untuk melakukan pelayanan. Pegawai ini mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pelaksanaan kegiatan kelompok kerja (POKJA) untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dengan dibantu oleh tenaga medis yaitu bidan desa yang telah ditugaskan untuk melakukan pemasangan kontrasepsi.

## **3. Pelatihan**

Para pegawai bagian bidang keluarga berencana tidak mendapatkan pelatihan khusus terkait pelaksanaan pelayanan menggunakan mobil pelayanan keliling sedangkan untuk para tenaga medis khususnya Bidan pelatihannya tersebut tidak diadakan oleh Dinas PPKB sendiri melainkan hanya berperan untuk mengajukan para

Bidan yang akan mengambil sertifikat CTU dan pelatihan akan diadakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Pelatihan merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai suatu hasil dari pembelajaran mengenai keahlian praktis serta pengetahuan yang memiliki hubungan dengan kompetensi tertentu yang berguna (Milah, 2020),

Pada pelatihan Dinas PPKB Kabupaten Lamongan untuk para pegawai bidang keluarga berencana hanya diberikan pengarahan terkait pelaksanaan pelayanan melalui mobil pelayanan keliling, pada saat pelaksanaan pelayanan melalui mobil keliling Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan bertugas menghubungkan dengan para Bidan yang sudah memiliki sertifikat pelatihan *Contraception Technology Update* (CTU). Para Bidan yang melakukan tindakan pemasangan kontrasepsi harus sudah melakukan pelatihan CTU, karena pada dasarnya pelatihan CTU sangat penting untuk para bidan dimana pelatihan tersebut agar para bidan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memberikan kontribusi penuh terhadap pelayanan keluarga berencana di masyarakat.

### **Integrasi**

Pada ukuran integrasi adalah suatu pengukuran terhadap tingkat kemampuan dari suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi menyangkut proses sosialisasi (Yuningsih, 2017).

#### **1. Proses Sosialisasi**

Berdasarkan hasil penelitian pada pelayanan melalui mobil pelayanan keliling tersebut pada proses sosialisasinya dilakukan dengan menyampaikan informasi pelayanan melalui para penyuluh yang berada di setiap kecamatan serta PPKBD dan Sub PPKBD di setiap desa. Menurut Gunawan (2012) sosialisasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk memberitahu informasi atau mengubah pendapat, sikap, perilaku baik langsung maupun tidak langsung (Sari et al., 2018).

Pada proses sosialisasi Dinas PPKB Kabupaten Lamongan sudah melakukan sosialisasi, penyampaian informasi pelayanan tersebut hanya melalui para kader penyuluh dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui broadcast link ke grup para kader untuk penerimaan informasi terkait gambaran, informasi, dan penjadwalan pelayanan yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui sosial media Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, tidak ada sosialisasi secara langsung yang diberikan kepada masyarakat semuanya melalui para kader penyuluh tersebut.

#### **2. Prosedur dalam pelayanan**

Dalam pelaksanaan pelayanan melalui mobil pelayanan keliling sudah memiliki prosedur yang jelas dan sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Prosedur tersebut dapat bersifat kondisional tergantung keadaan di lapangan saat pelaksanaan pelayanan keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling tersebut. Prosedur merupakan

bagian dari sistem yang berupa rangkaian dari tahapan-tahapan suatu tindakan secara berurutan dan jelas diatur pada setiap bagiannya agar suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Novasari, 2018).

Pada bagian ini masyarakat dapat mengajukan pelayanan pemasangan kontrasepsi secara langsung kepada PPKBD yang berada di desa dan diteruskan kepada penyuluh yang berada di balai penyuluhan untuk dilakukan pendataan serta disetorkan kepada kelompok kerja mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa Dinas PPKB. Setelah itu dilakukan penentuan jadwal pelaksanaan pelayanan oleh kelompok kerja. Kelompok kerja atau penyuluh berkordinasi dengan bidan koordinator kecamatan terkait pelaksanaan monalisa berdansa dan pengasuhan tenaga medis yang diperlukan, setelah itu kelompok kerja melaporkan kepada kepala dinas sekaligus mengajukan surat tugas.

### **3. Koordinasi dengan organisasi lain**

Pada kordinasi dengan organisasi lain, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelayanan melalui mobil pelayanan keliling melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang berada di Kabupaten Lamongan terkait pelaksanaan pelayanan melalui mobil pelayanan keliling. Menurut G.R, Terry koordinasi merupakan usaha yang berhubungan dan teratur dalam menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, serta menagrahkan pelaksanaan agar menghasilkan suatu tindakan yang sama dan serentak pada sasaran yang telah ditentukan (Alit, 2021).

Dinas PPKB sudah melakukan kordinasi dengan instansi lain yaitu kepada Dinas Kesehatan dan IBI yang dilakukan melalui surat menyurat secara resmi terkait penugasan Bidan desa yang akan melaksanakan pemasangan kontrasepsi, juga dilakukan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta perorangan melalui para kader penyuluh di desa tempat pelayanan tersebut diadakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan program keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa dapat dikatakan sudah efektif. Dapat dilihat dari ketiga ukuran yaitu: 1) pencapain tujuan, sudah efektif dapat dilihat dari tujuan yang telah tercapai dengan adanya peningkatan akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Pada kurun waktu Dinas PPKB sudah menetapkan dari awal terkait adanya penjadwalan setiap tiga bulan dan waktu mulai pelayanan. Pada sasaran yang konkrit, sudah ditetapkan diawal sasaran yang akan menerima pelayanan tersebut yaitu pasangan usia subur, masyrakta yang belum memakai keluarga berencana dan peserta keluarga berencana yang drop out. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa kurangnya pendanaan yang diberikan. 2) Adaptasi, sudah efektif dapat dilihat dari Dinas PPKB tidak melakukan pengadaan sarana prasarana secara khusus namun memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada seperti mobil unit pelayanan, mobil antar jemput akseptor dan mobil distriusi alkon. Pada pengisian tenaga kerja, Dinas PPKB memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada yaitu pegawai

dibidang keluarga berencana dan dilakukannya pembentukan kelompok kerja untuk menjalankan pelayanan melalui mobil pelayanan keliling tersebut. Pada pelatihan, para pegawai bidang keluarga berencana tidak diberikan pelatihan khusus namun hanya dilakukan pengarahan mengenai pelayanan melalui mobil pelayanan keliling serta mengajukan para bidan untuk dilakukan pelatihan mengenai CTU kepada pemerintah daerah. 3) Integrasi, sudah efektif dapat dilihat dari sudah adanya proses sosialisasi yang dilaksanakan melalui para kader penyuluh dari tingkat desa sampai kecamatan untuk penyampaian informasi terkait pelayanan. Pada prosedur pelayanan, sudah terdapat prosedur yang jelas namun bersifat kondisional tergantung kondisi di lapangan dan masyarakat dapat melakukan pengajuan untuk pemasangan kontrasepsi kepada para penyuluh. Pada Kordinasi dengan organisasi lain, kordinasi dilakukan dengan Dinas kesehatan dan IBI terkait penugasan bidan desa yang akan melakukan pemasangan kontrasepsi.

Saran yang bisa disampaikan oleh penulis antara lain, pada ukuran pencapaian tujuan, Dinas PPKB Kabupaten Lamongan dapat memberikan tambahan pendanaan untuk pelaksanaan pelayanan melalui mobil keliling tersebut, karena pelayanan ini mempermudah masyarakat terutama pasangan usia subur yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan pemasangan kontrasepsi. Pada ukuran Adaptasi, Dinas PPKB Kabupaten Lamongan dapat memberikan pelatihan khusus tentang pelayanan keluarga berencana melalui mobil pelayanan keliling desa bersama bidan desa kepada para pegawai bidang keluarga berencana agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada ukuran integrasi, Dinas PPKB Kabupaten Lamongan dapat mengadakan sosialisasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat agar tersampainya informasi dengan jelas dan masyarakat lebih memahami mengenai pelayanan yang akan dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Agustina, R. (2014). *Analisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana Olahraga Di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*. 19–42. [http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf)
- Alit, S. (2021). Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Melalui Kegiatan Bina Keluarga Balita di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Arif, D., & Zain, I. M. (2019). Studi Pola Keterjangkauan Puskesmas di Kabupaten Lamongan. *Swara Bhumi*, 1(2), 1–7.
- Auliansyah. (2020). Efektifitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Han, E. S., & goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Pelayanan Publik 1*, 53(9), 1689–1699.

- Junaidi. (2013). *Hubungan Sarana Prasarana dan Caring Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Pada Ruang Rawat Inap RSUD Dr.R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. 2008, 27–48.* <http://repository.ump.ac.id/8213/>
- Maryam, S. (2014). Analisis Persepsi Ibu Tentang Program Keluarga Berencana ( Kb ) Dengan Penggunaan Kontrasepsi Di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Tahun 2014. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO, 1(2), 65–71.* <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/download/16/13/>
- Milah, A. A. R. S. (2020). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir Terhadap Semangat Kerja. *Repositori Universitas Siliwangi, 1–152.*
- Mufasirin, I. (2021). *Banyak Anak Banyak Rezeki Perspektif Perlindungan Anak Pada Masyarakat Pinggiran ( Studi Masyarakat Dusun Mijil Desa Grogol Kecamatan Sawoo )* (Issue February).
- Novasari, A. (2018). Analisis Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2017. *Doctoral Dissertation, 15–33.*
- Nuraulian, N. (2017). Analisi Pengaruh Pertumbuhan Perhotelan Dan Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *UIN Raden Intan Lampung, Doctoral Dissertation, 19–23.*
- Reyes. (2018). Indikator Pelayanan Publik. *Kualitas Pelayanan, 3(1), 1–26.* [file:///C:/Users/Hp/Downloads/BAB II \(1\).pdf](file:///C:/Users/Hp/Downloads/BAB%20II%20(1).pdf)
- Roza, D., & Laurensius, A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(Juni), 606–624.*
- Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Program Studi Magister Ilmu Administrasi, 15, 135–141.*
- Suharmiati, Handayani, L., & Kristiana, L. (2012). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar) (Factors Influence Accessibility of Health Services at a Remote and Border Health Serv. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 15(No. 3), 223–231.*
- Yuningsih, D. K. & T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Ejournal3 Undip, 6(2), 1–11.* <https://media.neliti.com/media/publications/183710-ID-efektivitas-organisasi-dalam-penyelenggara.pdf>
- Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 188/40.1/KEP/413.109/2019 Tentang Inovasi Pelayanan KB Melalui Mobil Pelayanan Kliling Desa Bersama Bidan Desa (MONALISA BERDANSA)

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor: 188/85.1/KEP/413.109/2019 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Kerja (POKJA) Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (MONALISA BERDANSA)

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak

Laporan Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa Tahun 2020